

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA DAN  
KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**OLEH:  
Sri Ningsih  
(222015219)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA DAN  
KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Sri Ningsih  
Nim : 222015219**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**Tanda Pengesahan Skripsi**

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  
Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi  
Sumatera Selatan  
Nama : Sri Ningsih  
NIM : 222015219  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan  
Pada tanggal .....2019

Pembimbing I

Drs. Sunardi, S.E., M.Si  
NIDN/NBM : 020604630/784021

pembimbing II

Darmavanti, S.E., AK., M.M., CA  
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui,  
Dekan  
Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, SE., AK., M.Si, CA)  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Ningsih

Nim : 222015219

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019  
Penulis,

A yellow postage stamp with the text "PRETERAI TEMPEL" at the top, a serial number "AF35AFF90869509", and the value "5000" in large numbers. Below the value is "ERANKURU RUPIAH". A black ink signature is written over the stamp.  
Sri Ningsih

## **ABSTRAK**

**Sri Ningsih/222015219/2019/ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian kausalitas. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), serta satu variabel dependen yaitu Belanja Modal. Sampel dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kota/Kabupaten pada periode 2016-2018. Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2018.

**Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal**

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si., dan Ibu Darmayanti, S.E.,Ak.,M.M.,CA., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Para Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Para sahabat khususnya Agung Wijaya, Mella, Nyayu, Oka, Sartika, Dear, Meike, Eci, Budak Parkir Pojok, Posko 241, dan Teman Angkatan 2015.
7. Almamaterku.

Semoga Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.***

Palembang, Agustus 2019  
Penulis,

Sri Ningsih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	v
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	10
1. Pendapatan Asli Daerah .....	10
2. Dana Alokasi Umum .....	18
3. Belanja Modal .....	23
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal..	26
5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal .....	27
B. Penelitian Sebelumnya .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	32
D. Hipotesis .....	33



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Operasionalisasi Variabel .....	35
D. Data yang Diperlukan .....	36
E. Populasi dan Sampel .....	37
1. Populasi .....	37
2. Sampel .....	37
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data .....	39
1. Analisis Data .....	39
2. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Gambaran Umum .....	45
2. Deskripsi Data .....	49
3. Analisis Data .....	52
B. Pembahasan .....	61
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Dana Umum Terhadap Belanja Modal .....	61
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal .....	62
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal ....	64
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Keseriusan Pemerintah Daerah untuk mendorong dan menggali Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah porsi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur untuk lebih menghasilkan formulasi yang menguntungkan bagi daerah. Hal ini teraplikasi dari dana bagi hasil antara pusat

dan daerah melalui dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diharapkan dapat menjadi bentuk keadilan keuangan bagi daerah. Dana perimbangan ini juga diharapkan dapat menstimulus perekonomian daerah untuk dapat berkembang dan maju yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah penerima. Secara konseptual Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk seluruh wilayah Indonesia masih sangat tergantung dari dana transfer pusat (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), khususnya pada level kabupaten/kota. Dana transfer itu dibagi menjadi tiga jenis: dana perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU dan dana Alokasi Khusus/DAK).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa asset tetap. Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan asset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan

(*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian asset tersebut dalam jangka panjang.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal oleh pemerintah. Peningkatan Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan agar lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya dalam membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (Dana

Alokasi Umum) yang besar maka alokasi untuk anggaran Belanja Modal akan meningkat.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari berbagai komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum serta pengeluaran yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah belanja modal, karena melalui belanja modal pelayanan kepada publik khususnya pemenuhan sarana dan prasarana atau infrastruktur dapat terwujud sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja daerah. Belanja modal dibiayai dari dana PAD dan Dana Alokasi Umum. Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah yang riil terjadi yaitu jalan raya yang disana sini masih banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan merasakan ketidaknyamanan. Masalah lain yaitu masih

kurang memadainya infrastruktur yang terdapat di terminal serta masih banyak masalah lainnya yang perlu diperhatikan. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Sudah banyak penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian Priambudi (2017) dan Juniawan (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan studi Lestari (2016) dan Ayem (2018), menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal.

Studi penelitian Yawa (2015) dan Masruroh (2017) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Rachmawati (2015) dan Ayem (2018) menyimpulkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut antara lain: (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja); (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Ibukota Martapura); (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Ibukota Muara Dua); (4) Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung); (5) Kabupaten Muara Enim (Ibukota Muara Enim); (6) Kabupaten Lahat (Ibukota Lahat); (7) Kabupaten Musi Rawas (Ibukota Muara Beliti); (8) Kabupaten Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu); (9) Kabupaten Banyuasin (Ibukota

Pangkalan Balai); (10) Kabupaten Empat Lawang (Ibukota Tebingtinggi); (11) Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya); (12) Kota Palembang (Ibukota Palembang); (13) Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam); (14) Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau); (15) Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih); dan (16) Kabupaten Panukal Abab lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi).

Fenomena data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel I.1**  
**Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal**  
**pada Kota Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan**  
(dalam jutaan rupiah)

No	Kota/Kabupaten	Tahun	PAD	DAU	Belanja Modal
1.	Kab. Lahat	2016	184.972	1.071.421	373.661
		2017	134.434	703.887	391.513
		2018	121.765	696.379	452.736
2.	Kab. Musi Banyuasin	2016	169.012	703.887	569.702
		2017	203.693	347.346	747.244
		2018	212.733	370.826	294.551
3.	Kab. Musi Rawas	2016	96.743	324.483	432.324
		2017	115.000	643.608	298.071
		2018	121.862	639.753	519.420
4.	Kab. Muara Enim	2016	150.912	641.789	566.871
		2017	161.959	673.162	355.980
		2018	171.691	661.337	328.713
5.	Kab. Ogan Komering Ilir	2016	108.992	673.162	560.990
		2017	309.041	1.052.111	503.925
		2018	356.429	1.053.840	845.539
6.	Kab. Ogan Komering Ulu	2016	87.578	1.049.995	167.777
		2017	81.006	636.451	202.212
		2018	159.534	636.233	391.523
7.	Kota Palembang	2016	781.413	635.551	577.697
		2017	894.010	1.292.124	731.555
		2018	1.055.615	1.269.426	715.228

No	Kota/Kabupaten	Tahun	PAD	DAU	Belanja Modal
8.	Kota Prabumulih	2016	86.253	1.292.124	228.274
		2017	104.330	729.248	201.715
		2018	114.058	416.312	219.271
9.	Kota Pagar Alam	2016	51.113	414.173	246.648
		2017	52.126	390.844	222.932
		2018	62.107	391.943	217.428
10.	Kota Lubuklinggau	2016	75.797	390.188	175.957
		2017	82.747	448.143	439.408
		2018	114.914	449.082	295.627
11.	Kab. Banyuasin	2016	104.218	446.789	368.488
		2017	107.759	931.957	321.135
		2018	110.633	933.631	297.815
12.	Kab. Ogan Ilir	2016	109.762	930.550	222.327
		2017	283.501	625.366	452.628
		2018	203.562	623.348	377.128
13.	Kab. OKU Timur	2016	69.357	623.839	321.249
		2017	64.785	762.354	321.082
		2018	73.129	767.167	319.514
14.	Kab. OKU Selatan	2016	35.696	760.211	373.153
		2017	42.495	590.455	244.609
		2018	41.950	598.063	305.642
15.	Kab. Empat Lawang	2016	22.347	588.216	198.992
		2017	35.332	419.599	199.695
		2018	42.061	424.811	197.418
16.	Kab. Panukal Abab Lematang Ilir	2016	26.350	416.952	351.124
		2017	56.924	320.214	402.956
		2018	82.956	317.402	375.382
17.	Kab. Musi Rawas Utara	2016	32.174	319.054	355.021
		2017	34.120	381.592	288.978
		2018	35.659	383.935	311.455

(Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2019)

Berdasarkan data yang dihimpun sripoku.com, Selasa (6/3/2018) menyebutkan, total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pagaralam 2018 sebesar Rp817.250.572.112,86. bahwa sumber pendapatan terbesar yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp188.475.725.955, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp391.943.478.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp131.339.244.000. Dari anggaran yang ada terserap



untuk kepentingan Pilkada sekitar Rp35.927.446.000 yang terdiri dari KPU Rp23.427.446.000, Panwaslu Rp1.000.000.000, Polisi Rp11.000.000.000 dan kodim Rp1.500.000.000, ujar PLT Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Pagaralam. Akibat besarnya dana Pilkada tersebut apa saja dana yang dikorbankan atau dihapuskan. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Pagaralam mengalami penurunan dibandingkan 2017 baik dari segi belanja rutin maupun belanja yang merupakan tupoksi tetap dianggarkan. Namun OPD diminta untuk melakukan efisiensi anggaran, sedangkan untuk proyek apa yang terpaksa ditunda atau ditiadakan di tahun 2018 Pemkot menunda beberapa proyek pembangunan yang belum urgen. Hal ini agar anggaran pembangunan di tahun 2018 sangat mengedepankan azas manfaat untuk kebutuhan masyarakat Kota Pagaralam. Sementara itu, dana DAK Rp131.339.244.000 digunakan untuk, pembangunan infrastruktur, kepentingan pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar dan fasilitas umum lainnya. DAK digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dana ini juga tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain. Jadi sudah ada posnya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Umum terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal di Pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

#### 2. Bagi Intansi Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

#### 3. Bagi Almamater

Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaniz, Berlian Nur. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ayem, Sri. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara* Vol. 2 No. 2 Oktober 2018. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Badruddin, Rudy. 2016. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan* Volume 9 No 1 April 2011.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indraningrum, Try. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Juniawan, Made Ari. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Masruroh, Ary. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur*. *Simki-Economic* Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748. Kediri: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Monteiro, Josef M. 2017. *Pokok-pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Malang: Inteligensia Media.
- Priambudi, Wimpi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013*. *Jurnal Nominal / Volume Vi Nomor 1 / Tahun 2017*. Yogyakarta: Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Rachmawati, Mia. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat).
- Riduwan. 2014. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, A. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siregar, Baldrice. 2016. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratma. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama, Bandung.
- Yawa, Herman. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015. Manado: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.